

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adji Seno, Oemar, 1980 *Hakim Pidana*, Pen. Erlangga, Jakarta, 1980.
- Afiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*, Cetakan pertama, Jakarta, CV Akademika Pressindo, 1986.
- Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Pada Era Reformasi)*, Malang, UB Press, 2013.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- M. Moeliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Aceh, 2019.
- Mashudi, *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Bandung, Utomo, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Muladi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2001.
- Mulyani, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Ctra Adtya Bakti, Bandung, 2010.
- Prints, Darwint, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan, 1989.
- Prodjodikoro, R., Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.
- Purnomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ratna, N.A. 1985., *Praperadilan dan Ruang Ling-kupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Senp Adji, Oemar, *Hukum, Hakim Pidana*, Pen. Erlangga, Jakarta, 1980
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Mahakarya rangka offset Yogyakarta, 2013.

Supomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1982.

Wilanto, Darmoko Yuti *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung ,2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

C. Sumber lain

Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan

Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28

April 2015 <https://dntlawyers.com/apa-dasar-seseorang-ditetapkan-sebagai-ters>

[angka-tindak-pidana/](https://dntlawyers.com/apa-dasar-seseorang-ditetapkan-sebagai-ters)